



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KAMBALI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 653208

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.350 m2/138 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 1.510.000.000
2. Tanah Seluas 3.890 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 360.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/54 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **97.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI FL125 RCD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOBIL, TOYOTA ETIOS 1.2 E M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **178.700.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **30.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.496.200.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.496.200.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.